



Edukasi Dan Pendampingan Pembuatan NIB Untuk UMKM di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya

Aldo Prayoga Dinata¹, M. Taufiq², Riko Setya Wijaya³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Received: 20 Oktober 2023
Revised : 27 Oktober 2023
Accepted: 01 November 2023

At this time the Medokan ayu Village is experiencing an increase in the number of MSMEs. This is because more and more people want to open their own businesses due to the Covid-19 pandemic, where many employees have been laid off by companies, it is difficult to find new jobs, and other problems. However, with the development of MSMEs. In the Medokan Ayu sub-district, many MSMEs still do not know how important business legality is. The development of MSMEs actors requires permits and legality to show that their business is feasible and is operating. The preparation stage is where we collect data and map MSMEs in the Medokan Ayu village. Then the Implementation and Education Stage, we made socialization of business legality for MSMEs in the Medokan Ayu Village. Next was the manufacturing stage where we opened an NIB post during socialization, in several RWs in the Medokan Ayu sub-district, and door to door. Our first activity carried out outreach in the Medokan Ayu Sub-district where we also opened an NIB post there. In the second activity, we opened NIB posts in several RWs in the Medokan Ayu sub-district. our third activity is going door to door to MSMEs houses that need NIB. Conclusion: Making a Business Identification Number (NIB) is intended so that MSMEs actors in the Medokan Ayu Village can have business legality. Suggestions It is hoped that Medokan Ayu Village will continue to provide education to MSMEs that Legality is important for them. And it is also hoped that the Medokan Ayu Village for MSMEs will make it easier for the service of procedures for managing NIB.

Keywords: Assistance, NIB, MSMEs

(*) Corresponding Author: 20011010168@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Dinata, A. P., Taufiq, M., & Wijaya, R. S. (2023). Edukasi Dan Pendampingan Pembuatan NIB Untuk UMKM di Kelurahan Medokan Ayu Kota Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10072674>.

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berkembang pesat di kota Surabaya. Menurut informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, pada akhir tahun 2022 akan ada lebih dari 60.000 pelaku usaha. Sebanyak 13.441 UMKM tercatat di Dinas, menurut informasi dari pemerintah kota Surabaya. Di tingkat 31 kecamatan, tambahan 45.566 UMKM telah terdaftar. Jika UMKM diciptakan dan dipelihara secara efektif, mereka dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi. UMKM sendiri dapat menyediakan sebagai tempat atau platform bagi penduduk setempat untuk melakukan bisnis.

Salah satu kecamatan di Kecamatan Rungkut yang memiliki jumlah UMKM cukup signifikan adalah Kelurahan Medokan Ayu. Mengingat kampus Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur" hanya berjarak sekitar 100 meter, maka kawasan Kelurahan ini dianggap sebagai salah satu Kelurahan yang letaknya lebih strategis di bagian timur Surabaya. Selain itu, Medokan Ayu memiliki mangrove yang menjadi tempat berkumpulnya para UMKM. Dari 108 RT dan 15

RW di wilayah luas Kelurahan Medokan Ayu masing-masing ditempati oleh UMKM.

UMKM saat ini semakin marak di Kelurahan Medokan Ayu. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa karyawan di-PHK, sulitnya mencari pekerjaan baru, dan lain-lain, mendorong semakin banyak orang yang berkeinginan untuk membuka usaha sendiri. Toko kelontong, minuman dan makanan rumahan, pembuatan pakaian, batik, dan usaha lainnya hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak industri yang digeluti pelaku UMKM di Kelurahan Medokan Ayu. Seiring dengan sektor perdagangan, industri jasa juga bermunculan, termasuk laundry, bengkel, salon, kos, dan penyedia jasa lainnya. Selain mempercantik penampilan lingkungan, kehadiran pelaku UMKM juga dapat meningkatkan kesehatan keuangan dan aktivitas perekonomian daerah.

Meskipun UMKM di Kelurahan Medokan Ayu mengalami pertumbuhan, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya legalisme usaha. Perizinan dan legalitas diperlukan untuk pengembangan pelaku UMKM guna menunjukkan bahwa usaha tersebut layak dan berjalan. Legalitas dan perizinan usaha berfungsi sebagai alat pembelaan hukum dan sebagai prasyarat bagi pertumbuhan usaha. Karena perizinan sudah menjadi kewajiban usaha, pelaku UMKM juga diharapkan menjaga kualitas barang yang diproduksi dan layanan yang diberikan.

Masalah mendasar yang menyangkut pelaksanaan kekuasaan pengaturan dan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat adalah perizinan. (Arrum, 2019). Sebelum seseorang atau sekelompok individu dapat terlibat dalam suatu kegiatan dan mengambil tindakan, mereka harus terlebih dahulu mendaftar, merekomendasikan, mensertifikasi, menentukan kuota, dan mengamankan lisensi yang diperlukan. Selain itu, perizinan dapat berperan penting dalam mempercepat pengembangan modal ekonomi masyarakat (Suhayati, 2018).

Sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk yang beroperasi pada skala mikro, kecil, dan menengah, untuk memiliki izin agar usahanya dianggap legal. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan suatu perusahaan yang bergerak dalam kegiatan atau operasi komersial inilah yang menjadikan firma ini legal. Penulis (Kusmanto, 2019) mengklaim. Legitimasi usaha ini akan sangat penting dalam mendorong daya saing antar pelaku usaha UMKM di pasar internasional. Karena fokusnya pada kegiatan jual beli, banyak UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha. Akibatnya, pelaku usaha kerap mengabaikan legalitas usaha. Kegagalan untuk memahami manfaat legalitas usaha adalah faktor lain yang mendorong UMKM yang kurang memilikinya.

Pelaku usaha harus mendaftar secara online sebelum Lembaga OSS dapat memberikan izin perizinan online terintegrasi (online single submission). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui online single submission. Perjanjian yang dituangkan dalam surat atau keputusan berfungsi sebagai lisensi kontraktor. Setelah transaksi memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, izin diberikan. Bagi UMKM, perizinan usaha memberikan berbagai manfaat, termasuk mempermudah persyaratan pinjaman dan menerima bantuan pemerintah untuk pendapatan mereka. Di tingkat nasional dan lokal, membuktikan bahwa upaya mereka berdampak pada legitimasi administrasi.

Legitimasi perusahaan memerlukan keamanan dan perlindungan perusahaan untuk mencapai hal ini. Pelaku UMKM dapat mengajukan nomor identitas usaha (NIB) melalui Online Individual Transmission (OSS) sebagai bukti legitimasi organisasinya. Setelah pendaftaran pemilik usaha, lembaga OSS menerbitkan NIB, yang merupakan identitas pelaku komersial termasuk pemilik tunggal, unit hukum bisnis, dan unit. Sejak Mei 2018, Kementerian menggunakan izin Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Aturan ini menyarankan agar pemilik bisnis segera mengajukan NIB sebagai identitas perusahaan. UMKM dapat memanfaatkan kemudahan pengurusan legalitas usaha dengan NIB.

Berdasarkan keadaan tersebut maka kami melakukan pengabdian masyarakat sebagai kelompok 83 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dengan mengedukasi dan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Menurut analisis situasi, beberapa masalah yang harus ditangani oleh program pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

A. Keharusan mendapatkan izin usaha, dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengetahuan tentang OSS belum diketahui pelaku UMKM.

B. Pelaku UMKM bingung cara membuat Nomor Induk Usaha NIB (Online Single Submission).

C. Pelaku UMKM tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau memiliki tetapi tidak mengetahui fungsi..

METODE PENELITIAN

Legalitas sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, dengan menggunakan program KKN-T Kampus Merdeka di Kelurahan Medokan Ayu, kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui teknik Pembukaan posko NIB di Balai RW dan door to door dengan mendatangi setiap kediaman UMKM yang ada di wilayah Kelurahan Medokan Ayu. Agar UMKM lebih mengenal NIB, sosialisasi legalitas juga dilakukan di Kelurahan. Karena itu, pendekatan ini diterapkan dalam berbagai langkah, termasuk:

Tahap 1: persiapan

Tim pelaksana pengabdian masyarakat membuat formulir isian dengan data untuk memenuhi standar Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahap awal. Kami juga melakukan pendataan dan Pemetaan dengan seluruh UMKM. Terakhir, menyerahkan surat tugas yang dikeluarkan Kelurahan Medokan Ayu.

Setelah itu, siapkan sumber daya untuk pendidikan NIB melalui inisiatif penjangkauan.

Siapkan pula posko NIB di setiap RW di Kelurahan Medokan Ayu.

Tahap 2: Pemberian Edukasi dan pembukaan Posko NIB

Pelaksanaan edukasi dan pengisian formulir dilakukan dengan cara menshare google form di Ketua Rw. Tim juga menawarkan pendidikan dan pemahaman tentang situasi saat ini, Tim juga memberi pengetahuan tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan nilai kepatuhan hukum di perusahaan. Kemudian membantu menjawab pertanyaan pada saat Kegiatan Sosialisasi Legalitas di Kelurahan Medokan Ayu.

3. Tahap Pembuatan

Tim pelaksana bekerja secara independen dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibuat seiring waktu dari data masing-masing UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode google form yang disebar di Ketua RW. Pembuatan posko NIB saat sosialisasi legalitas Kecamatan Medokan Ayu dan mendirikan posko NIB di setiap RW, serta metode door to door bagi para UMKM yang dirasa tidak ada waktu untuk datang ke Kelurahan maupun di Balai RW

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama adalah mengumpulkan informasi dan mengelola UMKM di Kelurahan Medokan Ayu. Informasi ini diperoleh dari temuan pendataan UMKM terbaru oleh Kelurahan. Kemudian dibuat formulir pengisian dengan informasi pribadi pelaku usaha dan informasi bisnis aktual yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tak lupa, tim juga membuat surat amanat yang berhasil dikeluarkan Kelurahan Medokan Ayu sebagai bukti bahwa organisasi telah menyetujui dan mendukung kegiatan tersebut.



Gambar 1 : Perizinan kepada perangkat kelurahan dan pembuatan surat tugas

Kegiatan kedua kami adalah mengadakan Sosialisasi Legalitas yang ditujukan kepada para UMKM. Dengan dibuatnya Nomor Induk Perusahaan (NIB), diharapkan juga para pelaku UMKM akan lebih memahami pentingnya legitimasi perusahaan. Selain itu kami juga membuka Posko NIB pada saat Sosialisasi



Gambar 2 : Pemaparan Materi NIB kepada para UMKM di Kelurahan Medokan Ayu

Dalam kegiatan ini, tim mengajarkan kepada peserta apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), bagaimana hal itu membantu menjaga kelangsungan usaha, dan pentingnya legalitas usaha. Mereka juga membahas apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bagaimana cara kerjanya.



Gambar 3 :Pembukaan Posko NIB saat Sosialisasi

Selain itu, Membuat posko NIB yang berguna agar UMKM yang tertarik untuk mendaftar pada saat sosialisasi bisa langsung daftar di Psoko NIB yang sudah kami sediakan.

Kegiatan ketiga yang kami lakukan adalah membuka Posko NIB di setiap RW di kelurahan Medokan Ayu. Kegiatan ini dilakukan agar UMKM Medokan Ayu yang dirasa kejauhan untuk ke kelurahan Medokan Ayu bisa datang ke Posko NIB yang ada di Balai RW.



Gambar 4 : Pembukaan Posko NIB di Salah satu Balai RW di Kelurahan Medokan Ayu

Kegiatan ini sangat efektif dikarenakan , banyak sekali UMKM yang daftar NIB di setiap Balai Rw.

Kegiatan 4 adalah pembuatan NIB door to door , kegiatan ini dilaksanakan agar UMKM yang tidak sempat untuk datang ke Posko NIB baik di kelurahan Medokan Ayu dan di Balai RW bisa tetap mendaftar NIB



Gambar 5 : Pembuatan NIB salah satu UMKM dengan metode door to door Salah satu kegiatan pembuatan NIB di UMKM Dapoer Lena di Kelurahan Medokan Ayu.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain :

1. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan agar para pelaku UMKM di Kelurahan Medokan Ayu dapat memiliki legalitas usaha.
2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) dengan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dengan cara mengadakan Sosialisasi Legalitas .
3. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan saat posko NIB di Balai RW masing-masing dan ada juga yang langsung diserahkan kepada pelaku UMKM di kediamannya masing-masing dalam bentuk Softfile dan Hardfile.

SARAN

Diharapkan kepada Kelurahan Medokan Ayu agar terus memberikan edukasi kepada para UMKM bahwa pentingnya Legalitas untuk mereka. Dan diharapkan juga untuk Kelurahan Medokan Ayu untuk para UMKM agar di permudah pelayanan tata cara mengurus NIB.

DAFTAR PUSTAKA

- BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2(2).<http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231- 241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusnindar, A. A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. M. (2021). PELATIHAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK PEMBUATAN NOMER INDUK BERUSAHA UMKM DI KABUPATEN PRINGSEWU. *JURNAL BAGIMU NEGERI*, 5(2), 54-57.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. doi: 10.14710/alj.v2i4.697-709
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654. doi: 10.20473/jd.v2i5.15222
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205